

**KONVERSI MATA KULIAH  
KURIKULUM 2018  
MULAI BERLAKU UNTUK MAHASISWA PROGRAM GASAL T.A. 2019/2020**

No.	Kode MK	Nama MK	Perubahan/Materi	Status	Kd MK Konversi	Nama MK Konversi	SKS	Keterangan
1	MIK2221 MIK3240	Hukum Perusahaan Hukum Kepailitan dan PKPU	Hukum Perusahaan + Hukum Kepailitan dan PKPU	digabung	MKK3231	Hukum Perusahaan dan Kepailitan	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum program Hukum Perusahaan dan Hukum Kepailitan dan PKPU maka mahasiswa wajib memprogramkan Hukum Perusahaan dan Kepailitan</li> <li>- Sudah Program Hukum Perusahaan, namun belum memprogramkan Hukum Kepailitan dan PKPU maka tidak wajib mengambil MK Konversi</li> <li>- Sudah Program Hukum Perusahaan serta Hukum Kepailitan dan PKPU, maka mahasiswa tidak wajib memprogram MK Konversi.</li> <li>- Jika mahasiswa memprogram MK Konversi padahal sudah memprogram MK lama (sebelumkonversi) maka nilai sebelumnya pada MK lama akan dihapus.</li> </ul>
2	MIK2220 MPHB4234	Hukum Investasi Hukum Pasar Modal	Hukum Investasi + Hukum Pasar Modal	digabung	MKK5316	Hukum Investasi	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum program Hukum Investasi serta Hukum Pasar Modal maka mahasiswa wajib memprogramkan Hukum Investasi (MK Konversi)</li> <li>- Sudah Program Hukum Investasi, namun belum memprogramkan Hukum Pasar Modal maka mahasiswa tidak wajib mengambil MK Konversi.</li> <li>- Sudah program Hukum Investasi serta Hukum Pasar Modal maka mahasiswa tidak wajib untuk mengambil MK Konversi.</li> <li>- Jika mahasiswa memprogram MK Konversi padahal sudah memprogram MK lama (sebelumkonversi) maka nilai sebelumnya pada MK lama akan dihapus.</li> </ul>
3	MIK2217	Hukum Pemda dan Pemdes	dipecah menjadi Hukum Pemda dan Hukum Pemerintahan desa dan Kelurahan	dipisah	MKK3223 MKK3224	Hukum Pemda Hukum Pemerintahan desa dan Kelurahan	2 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum program Hukum Pemda pemdes maka wajib program MK hasil konversi (keduanya)</li> <li>- Bila Sudah memprogramkan MK Hukum Pemda Pemdes maka mahasiswa tidak wajib memprogramkan MK Konversi.</li> <li>- Jika sudah memprogram MK Pemda Pemdes namun akan melakukan perbaikan nilai maka wajib memprogram MK konversi keduanya, dengan konsekuensi nilai Hukum Pemda Pemdes yang telah diperoleh sebelumnya akan terhapus.</li> </ul>
4	MIK2218 MWHB4233	Hukum Perbankan Hk. Lembaga Pemb. Non Bank	Hukum Perbankan + Hk. Lembaga Pemb. Non Bank	digabung	MKK4320	Hukum Lembaga Keuangan	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum memprogram Hukum Perbankan maka mahasiswa wajib untuk memprogram MK hasil konversi.</li> <li>- Sudah program Hukum Perbankan, namun belum memprogramkan Hukum Lembaga Pembiayaan Non Bank maka mahasiswa tidak wajib untuk mengambil MK hasil konversi</li> <li>- Sudah program Hukum Perbankan serta Hukum Lembaga Pembiayaan Non Bank maka mahasiswa tidak wajib untuk mengambil MK Konversi.</li> <li>- Jika mahasiswa memprogram MK Konversi padahal sudah memprogram MK lama (sebelumkonversi) maka nilai sebelumnya pada MK lama akan dihapus.</li> </ul>
5	MKB3220	Teknik Perundang-undangan	dipecah menjadi Ilmu Perundang-Undangan dan Perancangan Perundang-undangan	dipisah	MKB5201 MWHP7204	Ilmu Perundang-Undangan Perancangan Perundang-undangan	2 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum memprogram MK Teknik Perundang-undangan maka mahasiswa wajib program MK Konversi (Ilmu Perundang-Undangan)</li> <li>- Bila Sudah memprogramkan MK Teknik Perundang-undangan maka mahasiswa tidak wajib memprogramkan MK Konversi</li> <li>- Jika mahasiswa sudah memprogram MK Teknik Perundang-undangan namun akan melakukan perbaikan nilai maka wajib memprogram MK Konversi Ilmu Perundang-undangan saja, dengan konsekuensi nilai Teknik Perundang-undangan yang telah diperoleh sebelumnya akan terhapus.</li> </ul>
6	MKK2306	Hukum Acara PTUN & Mahkamah	dipecah menjadi Hukum Acara MK dan Hukum Acara PTUN	dipisah	MKK4204 MKK4208	Hukum Acara MK Hukum Acara PTUN	2 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum memprogram MK Hukum Acara PTUN &amp; Mahkamah Konstitusi maka wajib program MK konversi (keduanya)</li> <li>- Bila Sudah memprogramkan MK Hukum Acara PTUN &amp; Mahkamah Konstitusi maka tidak wajib memprogramkan MK Konversi.</li> </ul>

									- Jika sudah memprogram MK Hukum Acara PTUN & Mahkamah Konstitusi namun akan melakukan perbaikan nilai maka wajib memprogram MK Konversi (keduanya) ,dengan konsekuensi nilai Hukum Acara PTUN & Mahkamah Konstitusi yang telah diperoleh sebelumnya akan terhapus.
7	MPES4258	Hukum Pertanahan	Pilihan Konsentrasi menjadi Wajib Program	diganti	MKK6230	Hukum Pertanahan	2		- Dapat diprogramkan untuk menambah SKS MK Wajib Program
8	MPES4259	Pluralisme Hukum Pertanahan		dihapus					
9	MPPHP4226 MWHHP4236	Hk. Kepend. & Keimigrasian Hk. Kewarganegaraan	Hk. Kepend. & Keimigrasian + Hk. Kewarganegaraan	digabung	MPPHP8201	Hk. Kewarganegaraan dan Keimigrasian	2		- Dapat diprogramkan
10	MPPHP4228	Politik Hukum dan Demokrasi		dihapus					
11	MPK1205	Kewirausahaan		dihapus					
12	MPK1306	Komputer		dihapus					
13	MWES4257	Penyelesaian Sengketa Adat dan ADR		diganti	MWES7205	Penyelesaian Sengketa Adat	2		- Dapat diprogramkan untuk MK Wajib Konsentrasi Bagian Hukum Masyarakat
14	MWES4251	Perbankan Syariah		dihapus					
15	MWHB4236	Hukum Pengangkutan		diganti	MWHB7205	Hukum Transportasi	2		- Dapat diprogramkan untuk MK Wajib Konsentrasi Bagian Hukum Bisnis
16	MWKA4206	Eksaminasi dan Legal Opinion		dipindah	MKK6203	Eksaminasi dan Legal Opinion	2		- Dapat diprogramkan untuk menambah SKS MK Wajib Program
17	MWKA4203	Mahkamah Internasional		dihapus					
18	MWPD4214 MWPD4215	Viktimologi Kriminologi	Viktimologi + Kriminologi	digabung	MWPD7203	Kriminologi dan Viktimologi	2		- Belum program Viktimologi dan Kriminologi maka wajib memprogramkan bagi Konsentrasi Hukum Pidana - Sudah Program Viktimologi atau Kriminologi maka tidak perlu Program MK konversi bagi konsentrasi Hukum pidana - Sudah program Viktimologi dan Kriminologi maka tidak wajib Program MK konversi - Jika memprogramMK Konversi padahal sudah memprogram mk lama sebelum konversi maka nilai mk lama dihapus
19	MWPD4217	Pembaharuan Hukum Pidana		diganti	MWPD7202	Hukum Pidana Internasional	2		- Dapat diprogramkan untuk MK Wajib Konsentrasi Bagian Hukum Pidana
20				Baru	MKK6240	Tindak Pidana Korupsi	2		- Dapat diprogramkan untuk menambah SKS MK Wajib Program
21				Baru	MWPD7204	Penitensier dan Penologi	2		- Dapat diprogramkan untuk MK Wajib Konsentrasi Bagian Hukum Pidana
22				Baru	MWKA7201	Arbitrase	2		- Dapat diprogramkan untuk MK Wajib Konsentrasi Bagian Hukum Acara
23				Baru	MWES7201	Akad Syariah	2		- Dapat diprogramkan untuk MK Wajib Konsentrasi Bagian Hukum Masyarakat
24				Baru	MWKA7202	Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Peradilan Ekstrayudisial	2		- Dapat diprogramkan untuk MK Wajib Konsentrasi Bagian Hukum Acara
25				Baru	MWHB7202	Hukum Kontrak Dagang	2		- Dapat diprogramkan untuk MK Wajib Konsentrasi Bagian Hukum Bisnis
26				Baru	MWHB7203	Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang	2		- Dapat diprogramkan untuk MK Wajib Konsentrasi Bagian Hukum Bisnis
27				Baru	MPPHB8202	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	2		- Dapat diprogramkan untuk MK Pilihan Konsentrasi Bagian Hukum Bisnis
28				Baru	MPES8202	Hukum Transaksi Adat	2		- Dapat diprogramkan untuk MK Pilihan Konsentrasi Bagian Hukum Masyarakat
29				Baru	MPES8204	Kapita Selektika Hukum Adat	2		- Dapat diprogramkan untuk MK Pilihan Konsentrasi Bagian Hukum Masyarakat
30	MIK3239	Peradilan Agama		diganti	MKK6205	Hukum Acara Peradilan Agama	2		- Belum Program MK lama wajib program MK konversi
31	MKK2401	Hukum Administrasi Negara (HAN)	4 SKS dirubah menjadi 3 SKS	ubah sks 4 ke 3	MKK3310	Hukum Administrasi Negara (HAN)	3		- Jika Belum Program maka wajib memprogram, jika mengulang diambil nilai terbaik dan SKS sesuai nilai terbaik
32	MKK1420	Hukum Dagang	4 SKS dirubah menjadi 3 SKS	ubah sks 4 ke 3	MKK2312	Hukum Dagang	3		- Jika Belum Program maka wajib memprogram, jika mengulang diambil nilai terbaik dan SKS sesuai nilai terbaik
33	MKK1421	Hukum Internasional (HI)	4 SKS dirubah menjadi 3 SKS	ubah sks 4 ke 3	MKK2315	Hukum Internasional (HI)	3		- Jika Belum Program maka wajib memprogram, jika mengulang diambil nilai terbaik dan SKS sesuai nilai terbaik

34	MKK1412	Hukum Perdata	4 SKS dirubah menjadi 3 SKS	ubah sks 4 ke 3	MKK2326	Hukum Perdata	3	- Jika Belum Program maka wajib memprogram, jika mengulang diambil nilai terbaik dan SKS sesuai nilai terbaik
35	MKK1413	Hukum Pidana	4 SKS dirubah menjadi 3 SKS	ubah sks 4 ke 3	MKK2332	Hukum Pidana	3	- Jika Belum Program maka wajib memprogram, jika mengulang diambil nilai terbaik dan SKS sesuai nilai terbaik
36	MKK1414	Hukum Tata Negara (HTN)	4 SKS dirubah menjadi 3 SKS	ubah sks 4 ke 3	MKK2335	Hukum Tata Negara (HTN)	3	- Jika Belum Program maka wajib memprogram, jika mengulang diambil nilai terbaik dan SKS sesuai nilai terbaik
37	MKK1410	Pengantar Ilmu Hukum (PIH)	4 SKS dirubah menjadi 3 SKS	ubah sks 4 ke 3	MKK1338	Pengantar Ilmu Hukum (PIH)	3	- Jika Belum Program maka wajib memprogram, jika mengulang diambil nilai terbaik dan SKS sesuai nilai terbaik
38	MKK1211	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	2 SKS dirubah menjadi 3 SKS	ubah sks 2 ke 3	MKK2337	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	3	- Jika Belum Program maka wajib memprogram, jika mengulang diambil nilai terbaik dan SKS sesuai nilai terbaik